

Sambut PTM, Pemkot Bogor Percepat Vaksinasi Guru di Mal

BOGOR (IM)- Sesuai keputusan pemerintah pusat, pembelajaran tatap muka (PTM) siswa bisa dilaksanakan pada Juli 2021. Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mengencakan vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh sekolah di Kota Bogor sebelum PTM dilaksanakan.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Abdu Rachim mengatakan, salah satu indikator pelaksanaan PTM menjadi lebih aman, yaitu apabila vaksin sudah diberikan kepada seluruh satuan sekolah. Dengan diberikannya vaksin terhadap guru dan tenaga kependidikan lain, Dedie mengaku, Pemkot Bogor lebih percaya diri untuk melaksanakan tatap muka pada Juli mendatang.

"Itu tadi, apabila seluruh stakeholder di bidang pendidikan sudah mendapatkan vaksin, maka pemerintah akan lebih confidence untuk melaksanakan tatap muka di bulan Juli 2021," kata Dedie, Rabu (7/4).

Dia menuturkan, saat ini seluruh satuan pendidikan di Kota Bogor belum mencapai tahap uji coba. Meskipun ada permintaan dari beberapa sekolah untuk melaksanakan uji coba PT secara mandiri. Dedie menegaskan, keputusan itu harus diselenggarakan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak juknis) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Tak hanya itu, Pemkot Bogor juga ingin memastikan dulu berapa vial vaksin yang akan datang lagi ke Kota Bogor. Sehingga, bisa terdapat berapa banyak guru, penjaga sekolah, penjaga kantin, pemilik sekolah, dan

satuan tenaga kependidikan lainnya yang harus divaksinasi. Sebab, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor pun belum mengajukan ke Pemkot Bogor kapan uji coba PTM dilaksanakan.

"Belum (mengajukan uji coba). Kan kita memastikan dulu nih, setelah rapat dipastikan berapa vial vaksin yang akan turun ke Bogor. Berapa banyak guru, pejuang sekolah, penjaga kantin yang harus divaksin, berapa banyak pemilik sekolah dan lain lain. Kalau itu selesai baru kita bisa masuk fase baru," tutur Dedie.

Sementara penyuntikan vaksin bagi tenaga pendidik SMP dan SMA di wilayah Kota Bogor masih terus dilaksanakan di Lippo Plaza Ekalokasari Bogor. Pelaksanaan vaksinasi untuk tenaga pendidik di pusat perbelanjaan atau mal tersebut dimulai sejak Senin (5/4) hingga Jumat (9/4).

Dalam rangka percepatan vaksinasi terhadap tenaga pendidik, vaksinasi di Lippo Plaza Ekalokasari dibantu oleh tenaga medis dari Rumah Sakit Siloam Hospitals Bogor, dua rumah sakit lain, dan tiga puskesmas.

Mall Director Lippo Plaza Ekalokasari Bogor, Henky Hiantoro berterima kasih kepada Pemkot Bogor telah mempercayakan program vaksinasi dengan target tenaga pendidik kembali dilaksanakan di Lippo Ekalokasari Bogor.

"Kami berharap dapat mendukung program pemerintah untuk mempercepat target vaksinasi dengan menyediakan layanan dan fasilitas yang mudah dijangkau bagi peserta vaksin," tutur Henky. ● **gio**

Tiga Calon Tersangka Dugaan Kredit Fiktif di BRI Cibinong

CIBINONG (IM)- Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor segera menetapkan tersangka kasus kredit fiktif di Bank BRI Cabang Cibinong. Siapa saja kandidatnya?

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Munaji, menyebutkan tiga orang calon tersangka itu ada yang merupakan pegawai BRI dan ada juga pihak swasta atau perorangan. Penyidik Kejaksaan Negeri Cibinong sudah mengamankan barang bukti awal.

"Kami sudah mengamankan bukti-bukti awal berupa catatan atau dokumentasi pembukuan nasabah KUR yang fiktif. Bukti-bukti awal tersebut merupakan hasil laporan Kepala Kantor BRI Cabang Cibinong," terangnya.

Munaji menuturkan puluhan orang saksi korban nasabah KUR fiktif telah diminta keterangan oleh jajarannya, mereka umumnya pernah mengajukan kredit namun sudah lunas, lalu tanpa sepengetahuannya data-datanya dipalsukan oleh para tersangka.

"Puluhan orang nasabah yang dipalsukan data-datanya dalam kasus dugaan korupsi dana KUR fiktif telah kami minta keterangan, mereka telah kami tetapkan sebagai saksi dalam kasus ini," tutur Munaji.

Ia menjelaskan bahwa kasus dugaan korupsi dana KUR fiktif ini yang kedua kalinya, sebelumnya pihaknya juga mengungkap modus yang sama di Kantor BRI Cabang Parungpanjang. ● **gio**



IDN/ANTARA

PENGEMBANGAN ALAT DISINFEKSI UNTUK KABIN PESAWAT
Peneliti dari LIPI mengoperasikan alat disinfeksi untuk kabin pesawat yang diberi nama Automated UVC Trolley di Gedung Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI) LIPI, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/4). Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI) LIPI mengembangkan prototipe alat disinfeksi menggunakan sinar UVC yang dirancang khusus dapat bergerak di ruang atau lorong sempit guna meminimalisir penyebaran COVID-19 di kabin pesawat.

Kota Bandung Rancang Integrasi Semua Layanan Dalam Satu Kanal

BANDUNG (IM)- Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, tengah merancang konsep pengintegrasian layanan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan pemerintah.

Menurut dia, pengintegrasian layanan ini yakni menyederhanakan semua layanan hanya dalam satu kali akses. Bahkan, satu data administrasi yang dimiliki masyarakat bisa dipakai untuk beragam keperluan layanan.

"Di tahun ini kami minta Diskominfo mengintegrasikan semua aplikasi yang ada. Sehingga semua bisa dengan satu kali input sudah terintegrasi semua," kata Yana, Rabu (7/4). Sambung dia, Pemkot Bandung telah memiliki modal besar dengan beragam layanan yang tersedia dalam kanal digital. Hanya saja, masih sebatas masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kini, Yana mengarahkan agar semua layanan dari berbagai OPD tersebut disatukan dalam sebuah kanal. Sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan pemerintah, cukup mengakses ke satu saluran saja. "Pengembangan aplikasi

awalnya hanya untuk kepentingan dinas. Sekarang kita minta diintegrasikan. Jadi untuk satu layanan, datanya juga bisa terkoneksi untuk layanan yang lainnya," ucapnya.

Sebagai cerminan, dia menilai ketika pandemi Covid-19 menepa Kota Bandung, OPD tak kesulitan saat diarahkan memindahkan layanannya secara daring. Bukan hanya sebatas memudahkan layanan, tapi sekaligus menjadi langkah untuk menekan penyebaran virus. "Di tengah pandemi, kami mendorong semua dinas untuk meminimalisir pertemuan antara yang memberi pelayanan dan yang diberi pelayanan. Sehingga interaksi jarang terjadi dan itu semua membutuhkan aplikasi," ujar dia.

Selain pengintegrasian layanan serta optimalisasi kanal digital, dia juga akan terus menggugah pandangan soal konsep smart city. Yakni, tidak hanya sebatas teknologi semata. Melainkan harus didukung perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. "Smart city bukan berarti sekadar terintegrasi. Tapi bagaimana warga masyarakatnya menghargai kotanya. Seperti contohnya itu tidak buang sampah sembarangan itu wujud smart people," tandasnya. ● **pur**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

DORNA SPORTS KUNJUNGI BANDARA LOMBOK

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (kedua kanan) bersama Managing Director Dorna Sports Carlos Ezpeleta (tengah) saat tiba di Bandara Internasional Lombok di Praya, Lombok Tengah, NTB, Rabu (7/4). Dorna Sports sebagai promotor ajang perlombaan MotoGP melakukan peninjauan ke Bandara Internasional Lombok untuk melihat kesiapan fasilitas bandara tersebut dalam menyambut gelaran balapan motor MotoGP di Mandalika Lombok.

Ridwan Kamil Jadikan Jabar Rumah Bersama bagi Semua Umat Beragama

Kami akan memberikan keadilan kepada semua umat beragama di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Keadilan itu bukan sama rata. Dalam keyakinan saya keadilan itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan takarannya. Semua difasilitasi tapi persentasenya berbeda-beda, kata Gubernur Jabar, M Ridwan Kamil.

BANDUNG (IM)- Gubernur Jawa Barat (Jabar), M Ridwan Kamil atau Kang Emil terus berupaya menjadikan Jawa Barat sebagai rumah bersama semua umat beragama, dengan mempermudah perizinan rumah ibadah.

"Saya juga terus berupaya sebagai gubernur menjadikan Jawa Barat sebagai rumah ber-

sama semua umat beragama. Perizinan-perizinan rumah ibadah terus kita permudah tidak boleh dipersulit," kata Kang Emil seuser bertemu secara daring dengan tokoh lintas agama dalam Dialog Tokoh Lintas Agama se-Jabar, di Kota Bandung, Rabu (7/4).

Gubernur berjanji akan memberikan keadilan kepada semua

umat beragama di Jabar, dengan menempatkan segala sesuatu sesuai dengan takarannya.

"Kami akan memberikan keadilan kepada semua umat beragama di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Keadilan itu bukan sama rata. Dalam keyakinan saya keadilan itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan takarannya. Semua difasilitasi tapi persentasenya berbeda-beda," kata dia.

Jadi, kata dia, kalau ada dana-dana dari Pemda Provinsi Jawa Barat semua umat beragama dapat mengesek.

Namun jika ada satu golongan lebih tinggi, semata-mata karena proporsional dari jumlah penganut agama tersebut.

"Itulah yang kita sebut dengan definisi adil, tidak selalu sama rata tetapi memberikan sesuai dengan ukuran dan takarannya masing-masing,"

katanya.

Di era digital ini, tak lupa Gubernur mewaspadai pengaruh negatif seperti ekstrimisme dan radikalisme yang mudah ditemukan di media sosial.

"Oleh karena itu kita harus lindungi jamaah. Kita lindungi umat kita dari kelompok-kelompok di media sosial yang menarasikan bahwa perbedaan bukan rahmat tapi perbedaan itu kebencian. Itu yang harus kita lawan, itu yang harus secara sistematis kita kuasai," ujarnya.

Gubernur mengapresiasi forum dialog tersebut dan minta untuk rutin dilakukan.

"Pada dasarnya mereka yang tidak mau berdialog tidak bisa memahami perspektif berbeda terhadap suatu masalah," kata Ridwan Kamil.

"Saya titip agar rajin mendiskusikan antara mereka-mereka yang berbeda. Jan-

gan selalu berdiskusi dengan mereka-mereka yang sama," katanya.

Selain itu, Gubernur mengajak forum berani mendiskusikan sesuatu yang bersifat sensitif agar tidak ada kesalahpahaman.

"Harus berani mendiskusikan hal-hal yang sensitif ya jangan dipendam karena hal sensitif itulah yang akhirnya tidak masuk ke dalam pemahaman mereka yang berdialog," katanya.

Ia pun berharap Kantor Kementerian Agama Jawa Barat dapat membimbing warga dan mengelola keberagaman serta toleransi di Tanah Pasundan.

"Kita buktikan bahwa menjadi provinsi yang jumlah penduduknya terbesar tapi juga menjadi provinsi paling baik dalam mengelola keberagaman, mengelola toleransi, dan lain sebagainya," katanya. ● **pur**

AWASI MASUKNYA PEMUDIK DARI LUAR KOTA

Pemkot Bogor Libatkan Polisi RW

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota Bogor akan memperkuat pengawasan di tingkat RW untuk memantau pergerakan pemudik dari luar kota seandainya lolos masuk ke Kota Bogor. Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim mengatakan, dalam pengawasannya, Pemkot Bogor akan melibatkan polisi RW yang telah dibentuk untuk mengawasi mobilitas pemudik yang masuk. Selain itu, aktivitas keluar masuk warga juga akan dipantau.

"Kami beri perhatian pada mereka (pemudik) yang masuk ke Kota Bogor dari luar kota," kata Dedie, Rabu (7/4).

Dedie menuturkan, langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi penyebaran kasus Covid-19 yang berasal dari luar kota atau imported case.

Dedie tidak ingin kasus Covid-19 di wilayahnya meningkat di momen Lebaran. Sebab itu, sambung dia, harus dilakukan antisipasi. Ia juga meminta, jika ditemukan pemudik yang lolos masuk ke Kota Bogor, pemudik tersebut harus melakukan karantina mandiri. "Kami coba siapkan mekanisme karantina mandiri bila ada kasus masuknya pemudik yang sampai lolos masuk RW," sebutnya.

Ia melanjutkan, saat ini Pemkot Bogor masih menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat tentang kebijakan larangan mudik Lebaran 2021. Dedie menyampaikan, meski masih menunggu aturan resmi terkait pelaksanaan dan teknis larangan mudik tahun ini, Pemkot Bogor tetap mendukung kebijakan tersebut.

Menurut dia, kebijakan larangan mudik yang telah diumumkan pemerintah pada pekan lalu pastinya telah dikaji terlebih dahulu. Sebab itu, kata dia, penting bagi setiap daerah, khususnya wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), mendukung langkah pemerintah. "Kalau ada larangan mudik, artinya sudah ada kajian dari pusat. Langkah pemerintah pusat ini harus kita dukung. Tapi, saat ini kami masih tunggu aturan resminya," pungkasnya. ● **gio**

Lurah dan Camat Wajib Awasi

Panduan Ibadah Ramadan di Wilayahnya

BOGOR (IM)- Para camat dan lurah diminta mengawasi terkait tata cara atau panduan pelaksanaan ibadah selama Ramadan dan Idulfitri di Kota Bogor. Khususnya potensi terjadinya kerumunan. Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim menuturkan, Pemerintah Kota (Pemkot) sebatas meneruskan 11 tata cara atau panduan ibadah Ramadan dan Idulfitri.

Dalam surat edaran Nomor SE 03 Tahun 2021, setidaknya ada 11 poin yang diatur Kementerian Agama. Mulai dari ibadah sahur, salat, hingga ibadah lainnya. "Kita mintanya wilayah memonitor terutama camat dan lurah. Memastikan DKM Masjid kooperatif sesuai dengan arahan dari menteri agama," papar Dedie, Rabu (7/4).

Ini 11 Poin Panduan Ibadah Ramadan dan Idulfitri dari Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19. Dari 11 poin ada 3 poin penting terkait potensi adanya kerumunan. Yakni, pembatasan tempat ibadah,

lalu lintas umat sehingga hanya masjid hanya berlaku bagi jemaah sekitar, dan tradisi Ramadan seperti takjil dan ngabuburit.

Dedie melihat, saat ini kasus Covid-19 di Kota Bogor terjadi penurunan, tetapi angka paparan kasus baru masih terjadi dan belum menunjukkan situasi aman. "Jadi biar gimana pun juga masyarakat diminta tidak boleh menimbulkan kerumunan. Termasuk ritual Ramadan seperti takjil, ngabuburit yang berpotensi menimbulkan kerumunan," kata Dedie.

Terkait vaksinasi pada Ramadan, Dedie menambahkan, sesuai anjuran pemerintah dan legal secara Islam oleh Majelis Ulama Indonesia. Kota Bogor akan terus melakukan vaksinasi kepada sasaran-sasaran yang berhak menerima vaksin. "Puasa nanti vaksinasi masih akan terus berjalan, tidak ada masalah. Perma vaksin pun diperbolehkan untuk disuntik sesuai ketentuan MUI," tambah Dedie. ● **gio**



IDN/ANTARA

ANGIN KENCANG LANDA KABUPATEN PURBALINGGA

Petugas memotong pohon beringin yang roboh dan menimpa bangunan, akibat terkena angin kencang dan hujan deras, di Taman Reptil Purbalingga, Jateng, Rabu (7/4). Hujan deras yang disertai angin kencang merobohkan pohon serta atap bangunan di Taman Reptil dan sejumlah atap rumah milik warga pada Selasa (6/4), di Kecamatan Kutasari dan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Jateng.